

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, 1983, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Atmakusumah, 1982, *Tahta untuk Rakyat*, Gramedia, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I, Cetakan Ke delapan, Djambatan, Jakarta.
- Dianto Bachriadi, 1998, *Merana di Tengah Kelimpahan*, ELSAM, Jakarta.
- Djoko Soekiman, 1986, *Sejarah Kota Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Hadi Suprpto, 1977, *Ikhtisar perkembangan Hukum Tanah DIY*, Karya kencana, Yogyakarta.
- Iman Sudiyat, 1982, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberty ,Yogyakarta.
- I Wayan Suandra, 1991, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- K.P.H Notoyudo, 1975, *Hak Sri Sultan atas Tanah di Yogyakarta*, Museum Kraton, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, April 2000, *Beberapa Kendala dalam penyelesaian Status Tanah Bekas Swapraja di DIY*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Sarjita, 2005, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dan Era Otonomi Daerah* , Tugu Jogja, Pustaka, Yogyakarta.

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Soedarisman Poerwokoesoemo, 1985, *Kasultanan Yogyakarta*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Soedarisman Poerwokoesoemo, 1946, *Kadipaten Pakualaman Yogyakarta*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang No.3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Presiden No.33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-undang No.5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Yogyakarta.

Surat Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia No.570.34-2493 Tahun 2003 Tentang Status Tanah Sultan Ground dan Pakualam Ground.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Putusan Desa mengenai peralihan hak andarbeni dari kelurahan dan hak

penganga turun temurun atas tanah dan perubahan jenis tanah di

Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.11 Tahun 1954 tentang peralihan hak milik perseorangan turun temurun atas tanah.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.12 Tahun 1954 tentang Tanda yang sah bagi hak milik perseorangan turun temurun atas tanah.

#### INTERNET

Bima Baskara, *Menuntut Kepastian Hukum Status Tanah Keraton*, <http://www.kompas.com>

Mafferdjiyulus, 2008, *Hapusnya Tanah Swapraja*, <http://www.wordpress.com>

Martinus Tamoluwu, 2008, *Status Hak Atas Tanah Ciptaan Pemerintah Surakarta*, <http://www.perpustakaan.uns.ac.id>

*Pemerintah Terus Data Sultan Ground*, <http://www.kompas.com>

Sugito, *Tanah Magersari Menjadi Salah Satu Keistimewaan DIY*, <http://www.kompas.com>

Suyitmo, *Asal-usul Tanah Sultan Ground dan Pakualam Ground*, <http://www.korantempo.com>,

Umar Kusumoharyono, 2006, *Eksistensi Tanah Kasultanan Yogyakarta Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor.5 Tahun 1960*, <http://www.mustaka.ac.id>